



BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Wakatobi adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama Daerah sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 Nomor 9);

26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 28);
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2021-2026.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Bupati adalah Bupati Wakatobi.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
7. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi.
8. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
11. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
12. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup IKU terdiri dari :
  - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
  - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ukuran keberhasilan dari pencapaian IKU Perangkat Daerah ditunjang dengan program perangkat daerah.
- (5) Indikator program perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) Setiap PD wajib menyusun IKU berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

### Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- c. menyusun laporan akuntabilitas kinerja;

- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja; dan
- e. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pengukuran kinerja.

## BAB V PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

### Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026.
- (2) Penetapan IKU masing-masing Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026 dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja sebagai berikut:
  - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator benefit; dan
  - b. IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat indikator outcome sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
  - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
  - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja PD.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (3) Dalam melaksanakan reviu dan evaluasi atas pelaksanaan IKU pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR     TAHUN 2022  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2021-2026

Penetapan Indikator Sasaran Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026

NO	VISI	MISI	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Wakatobi Sebagai Kabupaten Konservasi Maritim Yang Sentosa	Mengembangkan Kualitas Manusia	1	Mewujudkan Pendidikan Formal Dan Non Formal Yang Berkualitas	1	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Yang Merata, Bermutu, Dan Terjangkau	1	Angka Rata Rata Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	2	Meningkatnya Kualitas Akses Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	2	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			3	Meningkatkan Nilai-Nilai Iman Dan Takwa	3	Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Iman Dan Takwa	3	Angka Harapan Hidup	$P_t = P_0 + (\beta \cdot D) + (M \cdot M_j)$	Dinas Kesehatan/RSUD
					4		4	Indeks Kesalehan Sosial	Survey Indeks Kesalehan Sosial Masyarakat	Sekretariat Daerah

NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB		
			4	Pelestarian Dan Pengembangan Seni Budaya Daerah Dan Meningkatkan Prestasi Olahraga Daerah	4	Terlestari Dan Berkembangnya Apresiasi Seni Dan Budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	5	Survey Indeks Pembangunan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				5	Meningkatnya Partisipasi Dan Prestasi Olahraga Daerah	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	6	Survey Indeks Pembangunan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			5	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Dan Terintegrasi	6	Meningkatnya Kontribusi Sektor Andalan Terhadap PDRB Melalui Penguatan Multi Peran Pihak	7	Penduduk Yang Hidup Dibawah Garis Kemiskinan	$P_a = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^a$	Dinas Sosial & BPS
							7	Meningkatnya Kesempatan Kerja Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi	9	Tingkat Pengangguran Terbuka

NO	VISI	MISI	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
			6	Meningkatkan Pemberdayaan Gender	8	Meningkatnya Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi	10	Indeks Pemberdayaan Gender	Proporsi peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			7	Meningkatkan Peran Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan	9	Meningkatnya Status Desa	11	Indeks Desa Membangun	Survey Indeks Desa Membangun (IDM)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		3 Mengoptimalkan Pelayanan Publik	8	Meningkatkan Produktivitas Dan Integritas Aparatur Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel	10	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	12	Indeks Reformasi Birokrasi	Survey Indeks Reformasi Birokrasi	Inspektorat
			9	Meningkatkan Kualitas, Pemerataan Dan Penataan Infrastruktur	11	Meningkatnya Kualitas, Pemerataan Dan Penataan Infrastruktur Wilayah	13	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Survey Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang & Dinas Perhubungan
4	Mengembangkan Infrastruktur									

NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
		5 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	10 Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Efisien Dan Berkelanjutan	12 Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Efisien, Ramah Lingkungan Dan Minimalisasi Limbah/Sampah	14 Daya Dukung Lingkungan	Analisis Daya Dukung Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
					15 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Pengukuran Indikator Kualitas Air (IKA)  Pengukuran Indikator Kualitas Udara (IKU)  Pengukuran Indikator Kualitas Tutupan Lahan (IKLT)	Dinas Lingkungan Hidup

PARAF KEGORONGAN				
NO. UNIT / SATUAN KERJA PARAF				
1	Sekretaris Daerah			
2	Asisten Perencanaan & Rehab.			
3	Ke. Propaganda			
4	Kasubag Hukum			
5				

BUPATI WAKATOBİ,

  
HANANA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI WAKATOB  
NOMOR       TAHUN 2022  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
KABUPATEN WAKATOB  
TAHUN 2021-2026

Penetapan Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026

NO	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN PD	INDIKATOR PD	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Wakatobi Sebagai Kabupaten Konservasi Maritim Yang Sentosa	1 Mengembangkan Kualitas Manusia	1 Mewujudkan Pendidikan Formal Dan Non Formal Yang Berkualitas	Meningkatnya kualitas standar pelayanan pendidikan minimum (SPM) Pendidikan	Nilai capaian layanan SPM Bidang pendidikan	Jumlah Realisasi Layanan SPM (Pendidikan Dasar + Pendidikan PAUD + Pendidikan Kesetaraan) ----- x 100 % Total Layanan Dasar SPM Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Meningkatnya status Akreditasi Sekolah	Status Akreditasi Sekolah SD (A,B dan C)	Jumlah Sekolah SD Sederajat Akreditasi A ----- x 100 % Total Jumlah SD Sederajat yang di ajukan untuk Akreditasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Sekolah SD Sederajat Akreditasi A ----- x 100 % Total Jumlah SD Sederajat yang di ajukan untuk Akreditasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Sekolah SD Sederajat Akreditasi B ----- x 100 % Total Jumlah SD Sederajat yang di ajukan untuk Akreditasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN PD	INDIKATOR PD	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
						Jumlah Sekolah SD Sederajat Akreditasi C ----- x 100 % Total Jumlah SD Sederajat yang di ajukan untuk Akreditasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Sekolah SMP Sederajat Akreditasi A ----- x 100 % Total Jumlah SMP Sederajat yang di ajukan untuk Akreditasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Sekolah SMP Sederajat Akreditasi B ----- x 100 % Total Jumlah SMP Sederajat yang di ajukan untuk Akreditasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Sekolah SMP Sederajat Akreditasi C ----- x 100 % Total Jumlah SMP Sederajat yang di ajukan untuk Akreditasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan dan pengelolaan arsip daerah	Indek Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan dan Arsip	Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun ----- X 100.000 Jumlah Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan

NO	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN PD	INDIKATOR PD	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
					Menurunnya AKB per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu ----- X 1000 Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	Dinas Kesehatan
					Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu ----- X 1000 Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	Dinas Kesehatan
					Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Per 1000 Kelahiran di kurangi dengan AKB	Dinas Kesehatan
				Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Hasil Penilaian Tim Akreditasi	RSUD
					Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	RSUD
				Meningkatnya ketersediaan pangan utama	Persentase ketersediaan pangan Kabupaten	Jumlah Cadangan Pangan ----- x 100 % Jumlah Kebutuhan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
				Meningkatnya Keragaman konsumsi Pangan yang sehat dan aman bagi masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Skor)	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	Dinas Ketahanan Pangan

NO	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN PD	INDIKATOR PD	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
				Meningkatnya Pelayanan KB	Total Fertility Rate (TFR)	$TFR = 5 \sum_{i=15}^{45} ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{D_i}{P_i} \times 1000$	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif modern ----- X 100 % Jumlah Pasangan Usia Subur	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	(menikah/berpasangan) yang ingin anak ditunda + perempuan usia produktif yang tidak ingin punya anak lagi dan tidak menggunakan alat kontrasepsi ----- X 100 % Jumlah total perempuan usia reproduktif usia (15-49) yang menikah atau berpasangan	Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		3	Meningkatkan Nilai-Nilai Iman Dan Takwa	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Layanan Kepemudaan	Cakupan Kualitas Pembinaan Layanan Kepemudaan	Jumlah Lembaga Kepemudaan yang mendapatkan Layanan Bina Spritual ----- X 100 % Jumlah Seluruh Lembaga Pemuda Yang Terdaftar	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Meningkatnya partisipasi politik masyarakat yang sehat dan santun	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik	Jumlah Wajib Pilih yang mendapatkan Pendidikan Politik ----- X 100 % Jumlah Seluruh Wajib Pilih	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN PD	INDIKATOR PD	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
			4 Pelestarian Dan Pengembangan Seni Budaya Daerah Dan Meningkatkan Prestasi Olahraga Daerah	Meningkatnya nilai budaya dan seni budaya	Persentase warisan budaya yang ditetapkan	Jumlah warisan budaya yang ditetapkan ----- X 100 % Total warisan budaya yang teregistrasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	5 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Dan Terintegrasi	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial ----- X 100 % Jumlah Seluruh PMKS	Dinas Sosial
				Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UMKM meningkat	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Jumlah PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial ----- X 100 % Jumlah Seluruh PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Dinas Sosial
					Nilai omset koperasi	Jumlah Nilai omset koperasi	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
					Nilai omset UMKM	Jumlah Nilai omset UMKM	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

NO	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN PD	INDIKATOR PD	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
				Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Jumlah Angkatan Kerja ----- X 100 % Jumlah Penduduk Usia Kerja	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
					Tingkat kesempatan kerja (%)	Jumlah Penduduk yang Bekerja ----- X 100 % Jumlah Seluruh Pencari Kerja	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
				Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan pada PDRB daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	PDRB ADHK Sub Sektor Perikanan tahun n - PDRB ADHK Sub Sektor Perikanan Tahun n-1 ----- X 100 % PDRB ADHK Sub Sektor Perikanan Tahun n-1	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Meningkatnya kualitas layanan pengembangan pemuda kader yang memiliki jiwa kewirausahaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri ----- X 100 % Jumlah Seluruh Pemuda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Meningkatnya Pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	PDRB ADHK Sektor Pariwisata tahun n - PDRB ADHK Sektor Pariwisata Tahun n-1 ----- X 100 % PDRB ADHK Sektor Pariwisata Tahun n-1	Dinas Pariwisata
					Persentase Pertumbuhan Omset Ekonomi Kreatif	Omset Ekonomi Kreatif tahun n - Omset Ekonomi Kreatif Tahun n-1 ----- X 100 % Omset Ekonomi Kreatif Tahun n-1	Dinas Pariwisata

NO	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN PD	INDIKATOR PD	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
				Meningkatnya serapan tenaga kerja pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Orang yang kerja pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ----- X 100 % Jumlah Seluruh Orang yang Bekerja	Dinas Pariwisata
				Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	PDRB ADHK Sektor Pertanian tahun n - PDRB ADHK Sektor Pertanian Tahun n-1 ----- X 100 % PDRB ADHK Sektor Pertanian Tahun n-1	Dinas Pertanian
				Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Industri	PDRB ADHK Sektor Industri tahun n - PDRB ADHK Sektor Industri Tahun n-1 ----- X 100 % PDRB ADHK Sektor Industri Tahun n-1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	PDRB ADHK Sektor Perdagangan tahun n - PDRB ADHK Sektor Perdagangan Tahun n-1 ----- X 100 % PDRB ADHK Sektor Perdagangan Tahun n-1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Meningkatnya Realisasi Investasi	Persentase Pertumbuhan Investasi	Realisasi Investasi tahun n - Realisasi Investasi Tahun n-1 ----- X 100 % Realisasi Investasi Tahun n-1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Meningkatnya Standar dan Mutu Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil Survei	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN PD	INDIKATOR PD	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatkan 6 Pemberdayaan Gender	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Proporsi Keterwakilan Parlemen	Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen ----- X 100 % Total Seluruh Anggota Parlemen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Proporsi Pengambilan Keputusan	Jumlah Menejer, staf administrasi pekerja profesional dan teknis perempuan ----- X 100 % Total Seluruh Menejer, staf administrasi pekerja profesional dan teknis Laki-Laki	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Proporsi Distribusi Pendapatan	Jumlah Upah Buruh perempuan di sektor Non Pertanian ----- X 100 % Jumlah Upah Buruh Laki-Laki di sektor Non Pertanian	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan Komprehensif	Jumlah korban kekerasan Perempuan yang mendapatkan Pelayanan ----- X 100 % %Jumlah Korban Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Persentase Pelayanan Perlindungan Anak korban kekerasan	Jumlah korban kekerasan Anak yang di dampingi ----- X 100 Jumlah anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	capaian Kabupaten Layak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN PD	INDIKATOR PD	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
				Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga	Persentase Jumlah Kelompok yang dibina(BKB,BKR,BKL,BPIK,PIKR,UPPK)	Jumlah Kelompok yang dibina(BKB,BKR,BKL,BPIK-R,UPPKS) ----- X 100 % Total Kelompok (BKB,BKR,BKL,BPIK-R,UPPKS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Meningkatnya indeks status desa	Persentase desa berkembang	Jumlah desa berkembang ----- X 100 % Total Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Persentase desa Maju	Jumlah desa Maju ----- X 100 % Total Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Persentase desa Mandiri	Jumlah desa Mandiri ----- X 100 % Total Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Hasil Survei	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		3	Mengoptimalkan Pelayanan Publik	Meningkatkan Produktivitas Dan Integritas Aparatur Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel	8		

NO	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN PD	INDIKATOR PD	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
				Pemenuhan Capaian Standar pelayanan minimal urusan trantibunlinmas	Persentase capaian SPM urusan trantibunlinmas	Jumlah Realisasi Layanan SPM ----- --- x 100 % Total Layanan Dasar SPM	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
				Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil	Hasil Survei	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Meningkatnya Pengamanan Informasi Daerah	Persentase OPD Yang Menyelenggarakan Persandian Dalam Pengamanan Informasi	Jumlah PD Yang Menyelenggarakan Persandian ----- X 100% Jumlah PD	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
				Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektor	Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Sektor Dalam Melakukan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah PD yang Menggunakan Data Statistik ----- X 100% Jumlah PD	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

NO	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN PD	INDIKATOR PD	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
				Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai evaluasi SAKIP Kabupaten	Hasil Nilai Evaluasi MENPAN RB	Sekretariat Daerah
					Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Hasil Survei	Sekretariat Daerah
					Indeks Pelayanan Publik	Hasil Survei MENPAN RB	Sekretariat Daerah
				Meningkatnya Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD	Kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif	Prodak Hukum yang di tetapkan tepat waktu ----- X 100% Jumlah Prodak Hukum yang diajukan	Sekretariat DPRD
				Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	Hasil Survei IKM	Kecamatan
				Meningkatnya Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD	Kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif	Prodak Hukum yang di tetapkan tepat waktu ----- X 100% Jumlah Prodak Hukum yang diajukan	Sekretariat DPRD

NO	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN PD	INDIKATOR PD	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
				Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Indeks Kualitas Dimensi Perencanaan Pembangunan	Skor Kualitas Dimensi Perencanaan Pembangunan ----- X 100% Jumlah Dimensi Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai Index Inovasi Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Meningkatnya kualitas penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku, dan optimalnya waktu yang diperlukan dalam penyusunan RAPBD	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Kemandirian Daerah	PAD ----- X 100% APBD	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

NO	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN PD	INDIKATOR PD	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
				Meningkatnya profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN	jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor / nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$	BKPSDM
				Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur pemerintahan serta tatakelola keuangan daerah	Kapabilitas apip	Hasil perhitungan pemenuhan infrastruktur yang ada dalam IACM (Internal Audit Capability Model).	Inspektorat
					Maturitas spip	Hasil pengukuran terhadap fokus penilaian maturitas SPIP	Inspektorat
				Meningkatnya Kewaspadaan Dini Daerah Terhadap Potensi Konflik	Persentase Penurunan Gangguan Kantrantibmas	Jumlah Gangguan Kantrantibmas yang terjadi Tahun n ----- X 100% Gangguan Kantrantibmas yang terjadi tahun n-1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Meningkatnya Manajemen Kinerja OPD yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase ketersediaan dokumen Manajemen Kinerja OPD	Jumlah Dokumen Manajemen Kinerja (Dokumen Perencanaan, Dokumen Tata Kelola Keuangan dan Aset, Dokumen Tata Kelola Kepegawaian serta dokumen laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Tahun n ----- X 100% Jumlah Dokumen yang seharusnya	Seluruh Perangkat Daerah Kecuali SETDA

NO	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN PD	INDIKATOR PD	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	5	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	10 Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Efisien Dan Berkelanjutan	Meningkatnya Pengelolaan SDA secara efisien dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Udara	Indeks kualitas udara = $100 - \{50 / 0.9 \times \text{ieu} - 0.1\}$	Dinas Lingkungan Hidup
					Indeks Kualitas Air	$IPA = \frac{\sqrt{(Ci/Li)^2 M + (Ci/Li)^2 R}}{2}$	Dinas Lingkungan Hidup
					Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	IKTL dilakukan dengan membanding luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999	Dinas Lingkungan Hidup
				Terlestarikannya keanekaragaman sumber daya perikanan	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batas aman biologis (%)	Jumlah total hasil tangkapan dalam satu tahun ----- X 100 % jumlah tangkapan yang diperbolehkan dalam tahun yang sama	Dinas Kelautan dan Perikanan

PARAF PENGODINASI	
NO. BANTU / SATUAN KERJA PARAF	
1	Direktaris Daerah
2	Asisten Perencanaan & Pemb.
3	Kc. Bupptan
4	Kabes. Hukum
5	

BUPATI WAKATOBİ,

  
HAMANA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
 NOMOR TAHUN 2022  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH KABUPATEN  
 WAKATOBI TAHUN 2021-2026

Penetapan Indikator Program Perangkat Daerah Kabupaten  
 Wakatobi Tahun 2021-2026

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
1,1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		
1.1.1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
1.1.1.1	APK PAUD (%)	%	Jumlah Penduduk pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada PAUD ----- x 100% Jumlah penduduk usia 5 - 6 tahun
1.1.1.2	APK SD/Paket A (%)	%	Jumlah Penduduk pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada SD ----- x 100% Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun
1.1.1.3	APK SMP/Paket B (%)	%	Jumlah Siswa pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada SMP ----- x 100% Jumlah penduduk usia 13 -15 tahun
1.1.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Paket A	%	Jumlah Siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/Paket a ----- x 100% Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun
1.1.1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) Smp/Paket B	%	Jumlah Siswa usia 13-15 tahun dijenjang Smp/Paket b ----- x 100% Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun
1.1.1.6	Persentase penerapan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, SD (paket A) dan SMP (Paket B)	%	Jumlah sekolah yang menerapkan muatan lokal pada satuan pendidikan ----- x 100% Total jumlah sekolah
1.1.1.10	Rasio Jumlah Guru PAUD dengan Siswa PAUD	%	Jumlah Guru PAUD ----- x 100% Total murid PAUD
1.1.1.11	Rasio Jumlah Guru SD dengan Siswa SD	%	Jumlah Guru SD

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
			----- x 100% Total murid SD
1.1.1.12	Rasio Jumlah Guru SMP dengan Siswa SMP	%	Jumlah guru (SMP) ----- x 100% Jumlah murid (SMP)
1.1.1.13	Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-4	%	Jumlah guru kualifikasi S1/D-4 ----- x 100% Jumlah semua guru (PAUD)
1.1.1.14	Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-4	%	Jumlah guru kualifikasi S1/D-4 ----- x 100% Jumlah semua guru (SD)
1.1.1.15	Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-4	%	Jumlah guru kualifikasi S1/D-4 ----- x 100% Jumlah semua guru (SMP)
1.1.1.16	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan, SD (paket A) dan SMP (Paket B) yang Diselenggarakan masyarakat)	%	Jumlah ijin Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang diterbitkan ----- x 100% Jumlah ijin Pendidikan yang diajukan oleh masyarakat
1.1.1.17	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan (Pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat)	%	Jumlah ijin Pendidikan dasar ,yang diselenggarakan masyarakat yang diterbitkan ----- x 100% Jumlah ijin Pendidikan dasar yang diajukan oleh masyarakat
1.1.1.18	Persentase lembaga pendidikan yang dibina ( PAUD, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat)	%	Jumlah lembaga pendidikan yang dibina (PAUD, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat) ----- x 100% Jumlah seluruh lembaga pendidikan (PAUD, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat)
1.1.1.19	Persentase lembaga pendidikan yang dibina (Pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat)	%	Jumlah lembaga pendidikan yang dibina (Pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat) ----- x 100% Jumlah seluruh lembaga pendidikan (Pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat)
1.1.1.20	Persentase penerapan Kurikulum Muatan lokal Bahasa & Sastra daerah (Wakatobi) pada Satuan Pendidikan Paud	%	Jumlah sekolah yang menerapkan muatan lokal bahasa daerah (wakatobi) pada satuan pendidikan Paud ----- x 100% Total jumlah sekolah Paud
1.1.1.21	Persentase penerapan Kurikulum Muatan lokal Bahasa & Sastra daerah (Wakatobi) pada Satuan Pendidikan SD	%	Jumlah sekolah yang menerapkan muatan lokal bahasa daerah (wakatobi) pada satuan pendidikan SD ----- x 100% Total jumlah sekolah SD
1.1.1.22	Persentase Satuan Pendidikan SD yang mempunyai guru yang mengajarkan Muatan	%	Jumlah satuan Pendidikan SD yang mempunyai guru yang mengajarkan Muatan lokal Bahasa daerah eksakuliker kesenian

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
	lokal Bahasa daerah eksakulikuler kesenian		----- x 100% Total jumlah satuan Pendidikan SD
1.1.1.23	Porsentase penerapan Kurikulum Muatan lokal Bahasa & Sastra daerah (Wakatobi) pada Satuan Pendidikan SMP	%	Jumlah sekolah yang menerapkan muatan lokal bahasa daerah (wakatobi) pada satuan pendidikan SMP ----- x 100% Total jumlah sekolah SMP
1.1.1.24	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajarkan Muatan lokal bahasa daerah dan ekstrakurikuler kesenian	%	Jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajarkan Muatan lokal bahasa daerah dan ekstrakurikuler kesenian ----- x 100% Total Satuan Pendidikan
1.1.1.25	Persentase penetapan regulasi pengembangan bahasa dan sastra Daerah Kabupaten Wakatobi	%	tersedianya regulasi pengembangan bahasa dan sastra daerah kabupaten wakatobi
<b>1.2</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan</b>		
1.2.1	Dinas Kesehatan		
1.2.1.1	Persentase ibu hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan ibu Hamil	%	Jumlah ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan ----- X 100 % Jumlah ibu Hamil di Kabupaten
1.2.1.2	Persentase Ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan	%	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan ----- X 100 % Jumlah ibu Hamil di Kabupaten
1.2.1.3	Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	%	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan ----- X 100 % Jumlah ibu Hamil di Kabupaten
1.2.1.4	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	%	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai tandar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar ----- X 100 % Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten
1.2.1.5	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun ajaran ----- X 100 % Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten
1.2.1.6	Persentase orang usia 15 -29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar ----- X 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.2.1.7	Persentase Warga Negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrening kesehatan sesuai standar	%	Jumlah orang usia di atas 60 tahun di kab yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar ----- X 100 % Jumlah orang usia diatas 60 tahun di kabupaten
1.2.1.8	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar	%	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun ----- X 100 % Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi Kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun
1.2.1.9	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Orang Gangguan Jiwa (%)	%	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun ----- X 100 % Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
1.2.1.10	Cakupan Penemuan dan Penanganan Terduga TB (%)	%	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun ----- X 100 % Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama
1.2.1.11	Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Yang Mendapatkan Pemeriksaan HIV (%)	%	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun ----- X 100 % Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
1.2.1.12	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun ----- X 100 % Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
1.2.1.13	Presentase penemuan dan penanganan penyakit DBD	%	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP disatuwil. Kerja selama 1thn ----- X 100% Jumlah penderita DBD yang ditemukan disatu wilayah dalam Kurun wkt yang sama
1.2.1.14	Rasio Dokter Umum per satuan penduduk	%	Jumlah dokter umum ----- X 100% Jumlah penduduk

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.2.1.15	Rasio tenaga para medis per satuan penduduk	%	$\frac{\text{Jumlah tenaga para medis}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
1.2.1.16	Persentase usaha rumah tangga yang memiliki sertifikat layak kesehatan	%	$\frac{\text{jumlah usaha rumah tangga yang memiliki sertifikat laik kesehatan}}{\text{Jumlah total usaha rumah tangga}} \times 100\%$
1.2.1.17	Persentase rekomendasi terhadap usaha apotik, toko obat, toko alkes/ optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	%	$\frac{\text{jumlah rekomendasi terhadap usaha apotik, toko obat, toko alkes/ optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)}}{\text{Jumlah total usaha apotik, toko obat, toko alkes/ optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)}} \times 100\%$
1.2.1.18	Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan Kebijakan Germas	%	$\frac{\text{Jumlah Desa Kelurahan yang menerapkan kebijakan germas}}{\text{Jumlah desa kelurahan}} \times 100\%$
<b>1.2.2</b>	<b>Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)</b>		
1.2.2.1	Indikator Pelayanan Kesehatan Perorangan Rumah Sakit		
1.2.2.2	- BOR (Bed Occupancy Ratio)	%	$\frac{\text{Jumlah hari perawatan RS}}{\text{(Jumlah tempat tidur x Jumlah dari dalam satu periode)}} \times 100\%$
1.2.2.3	- ALOS (Average Length of Stay)	%	$\frac{\text{Jumlah lama dirawat}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}} \times 100\%$
1.2.2.4	- TOI (Turn Over Internal)	%	$\frac{\text{((Jumlah tempat tidur X Periode) - Hari perawatan)}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}$
1.2.2.5	- BTO (Bed Turun Over)	%	$\frac{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}{\text{Jumlah tempat tidur}}$
1.2.2.6	- NDR (Net Death Rate)	%	$\frac{\text{Jumlah pasien mati > 48 jam}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}} \times 1000 \text{ permil}$
1.2.2.7	- GDR (Gross Death Rate)	o/00	$\frac{\text{Jumlah pasien mati seluruhnya}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}} \times 1000 \text{ permil}$
1.2.2.8	Persentase jumlah tenaga kesehatan sesuai standar	%	$\frac{\text{Jumlah tenaga kesehatan yang ada}}{\text{(Jumlah kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar)}} \times 100\%$
1.2.2.9	Persentase kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	%	$\frac{\text{Jumlah nakes yang mempunyai kompetensi sesuai standar}}{\text{(Jumlah kebutuhan kompetensi nakes sesuai standar)}} \times 100\%$

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.3	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>		
1.3.1	<b>Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>		
1.3.1.1	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga diseluruh kabupaten/kota}} \times 100\%$
1.3.1.2	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + Jumlah rumah yang lumpur tinja telah di olah di PLT + Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di kabupaten/kota}} \times 100 \%$
1.3.1.3	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Sanitasi Akses Aman	%	$\frac{\text{Jumlah Rumah yang memenuhi standar sanitasi Domesik}}{\text{Jumlah rumah di kabupaten/kota}} \times 100 \%$
1.3.1.4	Berkurangnya kawasan rawan genangan, banjir M3	Jumlah	$\frac{\text{Luas Kawasan Rawan Genangan/Banir}}{\text{Luas KawasanPermukiman}} \times 100 \%$
1.3.1.5	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik	%	$\frac{\text{Panjang Jalan Lingkungan dalam kondisi Baik}}{\text{Panjang Jalan Lingkungan Startegis Wilayah Kabupaten}} \times 100 \%$
1.3.1.6	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota (%)	%	$\frac{\text{Jumlah Bangunan yang ber IMB}}{\text{jumlah Bangunan}} \times 100 \%$
1.3.1.7	Persentase Ruang terbuka Hijau (RTH) (luas rencana RTBL/ Ha)	%	$\frac{\text{Luas Kawasan Penataan Bangunandan Lingkungan (RTH) yang tertangani}}{\text{Rencana Luas Kawasan Penataan Bangunandan Lingkungan (RTBL)}} \times 100 \%$
1.3.1.8	Persentase panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	%	$\frac{\text{Jumlah Panjang Jalan Kondisi Mantap (Meter)}}{\text{Jumlah Panjang Total Jalan Kabupaten}} \times 100 \%$
1.3.1.9	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar Kompetensi	%	$\frac{\text{Jumlah Pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi}}{\text{Jumlah keseluruhan pelaku jasa konstruksi}} \times 100 \%$
1.3.1.10	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Orang	Jumlah tenaga kerja kontsruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.3.1.11	Ketersediaan dokumen rencana tata ruang kabupaten wakatobi.	%	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA ----- x 100 % Jumlah Dokumen yang harud diseslesaikan
1.3.1.12	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten	%	Jumlah Kesesuaian Pemanfaatan Ruang ----- x 100 % Rencana Tata Ruang
<b>1.4</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman</b>		
1.4.1	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman		
1.4.1.1	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun N ----- x 100 % Jumlah rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun N
1.4.1.2	Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota bagi masyarakat	%	Rumah Tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni ----- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan
1.4.1.3	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 (ha) yang ditangani ----- X 100% luas kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 (ha)
1.4.1.4	Persentase perbaikan rumah tidak layak huni dalam pencegahan berkembangnya permukiman kumuh	%	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani ----- X 100% Jumlah rumah diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha
1.4.1.5	Persentase prasarana sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	%	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitas PSU ----- X 100% Jumlah total unit rumah kabupaten/kota
1.4.1.6	Jumlah badan usaha/Perorangan Bidang Perumahan dan Pemukiman yang memenuhi standar Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registraasi	%	Jumlah badan usaha/Perorangan Bidang Perumahan dan Pemukiman yang memenuhi standar ----- X 100% Jumlah total badan usaha/Perorangan Bidang Perumahan dan Pemukiman

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
<b>1.5</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>		
1.5.1	Satpol PP Dan Damkar		
1.5.1.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditangani	%	pelanggaran ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat yang terselesaikan ----- x 100% jumlah pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat dan teridentifikasi oleh Sat Pol PP
1.5.1.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	%	Jumlah penanganan pelanggaran terhadap perda dan perbub yang ditegakan -----x 100% Total jumlah pelanggaran
1.5.1.3	Presentase pelayanan, penyelematan dan evakuasi korban kebakaran	%	jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran ----- x 100% luas wilayah kabupaten
1.5.1.4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit ----- x 100% Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK
1.5.2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.5.2.1	Presentase Penanganan Pra Bencana	%	Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan pra bencana ----- x 100% seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana
1.5.2.2	Presentase Penanganan Tanggap darurat bencana	%	Jumlah Korban Bencana yang di tangani ----- x 100% Jumlah Korban Bencana
1.5.2.3	Presentase Penanganan Pasca bencana		Jumlah sarana dan prasarana yang di tangani ----- x 100% Jumlah sarana dan parasarana yang terdampak
1.5.2.4	Presentase Penyelesaian Dokumen kebencanaan sampai di nyatakan sah dan legal		Jumlah Dokumen Kebencanaan yang di nyatakan sah dan Legal ----- x 100% Jumlah Dokumen Kebencanaan (4 Dokumen)
<b>1.6</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</b>		
1.6.1	Dinas Sosial		
1.6.1.1	Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan ----- x 100% Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.6.1.2	Presentase Penangan Warga Negara Migran	%	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani ----- x 100% Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
1.6.1.3	Presentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gelandang Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gelandang Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100% Populasi Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gelandang Pengemis
1.6.1.4	Cakupan penerima manfaat bantuan iuran	%	Jumlah cakupan penerima manfaat jaminan keluarga yang terlayani ----- x 100% Jumah cakupan penerima manfaat jaminan keluarga yang ada
1.6.1.5	Presentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah/kab	%	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggran ----- x 100% Populasi Korban Bencana Alam dan sosial didaerah kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat
1.6.1.6	Presentase Pemeliharaan TMP	%	Jumlah Paket Pemeliharaan TMP yang dikerjakan ----- x 100% Paket Pemeliharaan TMP yang tersedia
<b>2</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>		
<b>2.1</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja</b>		
2.1.1	Dinas Koperasi, UMKM Dan Tenaga Kerja		
2.1.1.1	Persentase Pemenuhan Tenaga Kerja yang produktif, Optimal dan pendayaguna	%	Jumlah Tenaga Kerja yang di tempatkan sesuai Kompetensi ----- X 100% Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar
2.1.1.2	Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	jumlah tenaga kerja yang dilatih ----- X 100% jumlah tenaga kerja dikali
2.1.1.3	Persentase tenaga kerja yang terserap dalam dunia usaha	%	Jumlah tenaga kerja ditempatkan ----- x 100% jumlah pencari kerja yang terdaftar

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
2.1.1.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bripartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga kerjaan	%	$\frac{\text{jumlah perusahaan perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bripartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga kerjaan)}}{\text{jumlah perusahaan yang terdaftar}} \times 100\%$
<b>2.2</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak</b>		
2.2.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
2.2.1.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung di APBD}} \times 100\%$
2.2.1.2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	$\frac{\text{Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{jumlah penduduk perempuan dikali 100\%}} \times 100\%$
2.2.1.3	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Keluarga yang mendapatkan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan	%	$\frac{\text{Persentase Lembaga Penyedia layanan keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan}}{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Pemenuhan Hak Anak}} \times 100\%$
2.2.1.4	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki data Gender dan Anak	%	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Memiliki data gender dan anak}}{\text{jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$
2.2.1.5	Persentase Sarana dan Prasarana Pemenuhan Hak anak	%	$\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Pemenuhan Hak Anak}}{\text{Total Jumlah Sarana dan Prasarana Pemenuhan Hak Anak}} \times 100\%$
2.2.1.6	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi Kabupaten/Kota terkait	%	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia mulai dari 18 tahun) korban kekerasan yang di tangani instansi tingkat kab / kota yang di damping}}{\text{dibagi Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$
<b>2.3</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pangan</b>		
2.3.1	Dinas Ketahanan Pangan		
2.3.1.1	Ketersediaan Energi Perkapita (Kkal/Kap/Hari)	(Kkal/Kap/Hari)	$\frac{\text{Ketersediaan Energi/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan Kalori} \times \text{BDD}}{100}$
2.3.1.2	Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari)	(Gram/Kap/Hari)	$\frac{\text{Ketersediaan Protein/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan Kalori} \times \text{BDD}}{100}$

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
2.3.1.3	Peningkatan Konsumsi Sayur dan Buah(Kg/Kap/Th)	(Kg/Kap/Th)	% angka kecukupan gizi (AKG) x Bobot Masing - Masing Kelompok Pangan
2.3.1.4	Jumlah Desa Yang terbebas dari status rentan rawan pangan sesuai lokus peta FSVA	Jumlah	Jumlah desa rentan rawan pangan yang berhasil ditingkatkan statusnya menjadi desa tahan pangan
2.3.1.5	Persentase pengawasan keamanan Pangan pangan (%)	%	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di suatu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu ----- x 100% Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang ditetapkan dalam kurun waktu tertentu
<b>2.4</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</b>		
2.4.1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
2.4.1.1	Persentase tanah pemerintah daerah yang bersertifikat	%	jumlah bidang Tanah pemda yang tersertifikat ----- x 100% Jumlah seluruh bidang tanah pemerintah daerah *
<b>2.5</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>		
2.5.1	Dinas Lingkungan Hidup		
2.5.1.1	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan Hidup	%	Jumlah Dokumen lingkungan Hidup yang tersedia ----- X 100% Jumlah Dokumen Lingkungan yang seharusnya
2.5.1.2	Cakupan Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	%	Titik Area LH Yang Tertangani ----- X 100% Jumlah Titik Area LH Yang Rusak
		%	Jumlah Pemantauan pencemaran yang terukur ----- X 100% Jumlah Titik Yang ditetapkan
2.5.1.3	Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	%	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Yang Dikelola ----- X 100% Jumlah Ruang Terbuka Hijau Yang Ada
2.5.1.4	Cakupan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	Jumlah penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ----- X 100% usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
2.5.1.5	Cakupan Pengakuan dan perlindungan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	$\frac{\text{Jumlah MHA Yang Diakui}}{\text{Jumlah Usulan MHA}} \times 100\%$
2.5.1.6	Persentase MHA Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Terkait PPLH	%	$\frac{\text{Jumlah MHA Yang Mendapatkan Pelatihan}}{\text{dibagi Jumlah MHA Yang Ada}} \times 100\%$
2.5.1.7	Cakupan Mitra Strategis Lokal, Nasional dan Internasional Dalam PPLH	%	Jumlah Lembaga Lokal, Nasional Yang Bermitra dengan DLH dalam PPLH
2.5.1.8	Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk Kelompok masyarakat	%	$\frac{\text{Kelompok Masyarakat yang terlibat dalam pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH}}{\text{Jumlah Kelompok Masyarakat LH yang Ada}} \times 100\%$
2.5.1.9	Persentase capaian pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota (%)	%	$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani ( m3 )}}{\text{Volume produksi sampah (m3)}} \times 100\%$
<b>2.6</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil</b>		
2.6.1	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
2.6.1.1	Capaian Penataan Administrasi Kependudukan	%	$\frac{\text{Jumlah Penduduk 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah Penduduk 17 tahun ke atas}} \times 100\%$
		%	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang (satu) hari}} \times 100\%$
2.6.1.2	Capaian Pelayanan Pencatatan Sipil	%	$\frac{\text{jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{peristiwa kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$
		%	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki Akta Lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100\%$
2.6.1.3	Capaian Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Kependudukan	%	$\frac{\text{jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten kota dalam satu tahun}}{\text{1 tahun}} \times 100\%$
2.6.1.4	Capaian Pemanfaatan Data	%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
<b>2.7</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Masyarakat Dan Desa</b>		
2.7.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2.7.1.1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	Jumlah Desa Tertinggal ----- X 100% dibagi Jumlah Desa dalam Satu Kabupaten dikali
2.7.1.2	Persentase Peningkatan Kerja sama Desa	%	Jumlah Kerja sama desa dan kawasan perdesaan tahun ini ----- X 100% dibagi total target Kerjasama Desa dan kawasan perdesaan Selama 5 Tahun
2.7.1.3	Jumlah Aparatur dan Pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	Orang	Jumlah Aparatur dan Pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes setiap Tahunnya
2.7.1.4	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	%	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Posyandu, PKK, LPM dan Karang Taruna) dan Lembaga Adat Desa dan masyarakat hukum adat serta Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan masyarakat dibagi total target Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan masyarakat Selama 5 Tahun dikali 100%
<b>2.8</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b>		
2.8.1	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
2.8.1.1	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	%	Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 ----- x 100% Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama
2.8.1.2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP ----- x 100% Jumlah pasangan usia subur
2.8.1.3	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	%	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE) ----- x 100% Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (Advokasi dan KIE)
2.8.1.4	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Jumlah	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25- 49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
			umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.
2.8.1.5	Cakupan Anggota Kelompok yang Aktif Dalam Pembinaan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK-R,UPPKS)	%	Jumlah Kelompok (BKB,BKR,BKL,PIK-R,UPPKS) yang Aktif dalam Pembinaan Keluarga ----- x 100% Jumlah Kelompok (BKB,BKR,BKL,PIK-R,UPPKS) yang ada
<b>2.9</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan</b>		
2.9.1	Dinas Perhubungan		
2..9.1.1	Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	Jumlah Kendaraan yang di uji pertahun ----- x 100% Jumlah Kendaraan Wajib Uji
2..9.1.2	Presentase Pemasangan Perlengkapan Jalan Pada Jalan Kabupaten	%	Jumlah Pemasangan Perlengkapan Jalan Kabupaten ----- x 100% Target Kebutuhan Perlengkapan Jalan
2..9.1.3	Presentase Pelabuhan Pengumpan Lokal/Pelabuhan Daerah yang Ditingkatkan	%	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal/Pelabuhan Daerah yang di Tingkatkan ----- x 100% Jumlah Keseluruhan Pelabuhan Pengumpan Lokal/Pelabuhan Daerah yang akan di Tingkatkan
2..9.1.4	Jumlah Orang Melalui Dermaga per Tahun (orang)	ORANG	Jumlah Orang yang Melalui Dermaga Per Tahun
<b>2.10</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika</b>		
2.10.1	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		
2.10.1.1	Persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintahan atau menggunakan akses internet yang diamankan dan disediakan ----- X 100 % Jumlah OPD
2.10.1.2	persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah kab ----- X 100 % jumlah penduduk
2.10.1.3	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	Jumlah PD yg memiliki portal dan situs web yang sesuai standar ----- X 100 % Jumlah PD

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
<b>2.11</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah</b>		
2.11.1	Dinas Koperasi, UMKM Dan Tenaga Kerja		
2.11.1.1	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	jumlah koperasi yang di periksa dan di awasi ----- x 100% jumlah koperasi yang terdaftar
2.11.1.2	Cakupan Koperasi simpan pinjam /USP yang sehat	%	Jumlah koperasi simpan pinjam ----- X 100% USP yang sehat/jumlah koperasi aktif dikali
2.11.1.3	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	Jumlah kopersi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ----- x 100% Jumlah koperasi yang terdaftar
2.11.1.5	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	Jumlah koperasi yang telah di terbitkan sertifikat nomor induk koperasi (NIK) ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada
2.11.1.6	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha ----- x 100% jumlah seluruh koperasi
2.11.1.7	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ----- x 100% jumlah usaha mikro yang terdaftar
2.11.1.8	cakupan fasilitasi sarana prasarana penunjang pengembangan UMKM	%	jumlah UMKM yang difasilitasi sarana dan prasarana ----- x 100% jumlah usaha mikro yang terdaftar
<b>2.12</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</b>		
2.12.1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2.12.1.1	Jumlah Investasi PMA dan PMDN (Rp)	Rp	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
2.12.1.2	Jumlah Investor PMDN & PMA	Jumlah	Jumlah Investor PMDN & PMA
2.12.1.3	Persentase Izin Yang Di terbitkan	%	$\frac{\text{Jumlah Izin}}{\text{Jumlah permohonan Izin}} \times 100\%$
2.12.1.4	Persentase Kesesuaian Izin Sesuai Peruntukannya	%	$\frac{\text{Jumlah Izin Sesuai Peruntukannya}}{\text{Jumlah Izin Yang terbit}} \times 100\%$
2.12.1.5	Tersedianya data dan Sistem Informasi Perizinan Yang Terintegrasi Secara Elektronik	Ada/Tidak	Tersedianya Sistem Informasi Perizinan Yang Terintegrasi Secara Elektronik
<b>2.13</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga</b>		
2.13.1	Dinas Pemuda Dan Olahraga		
2.13.1.1	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda}} \times 100\%$
2.13.1.2	Presentase Wirausahawan Muda Yang Terlatih	%	$\frac{\text{Jumlah Wirausahawan Muda yang Dilatih}}{\text{Jumlah Seluruh Wirausahawan di Kab. Wakatobi}} \times 100\%$
2.13.1.3	Cakupan Pembinaan Olahraga Unggulan dan Potensial	%	$\frac{\text{Jumlah Cabang Olahraga Unggulan dan Potensial yang di bina}}{\text{Jumlah Seluruh Cabang Olahraga Unggulan dan Potensial}} \times 100\%$
2.13.1.4	Cakupan Pelatih Olahraga Unggulan dan Potensial yang bersertifikasi	%	$\frac{\text{Jumlah Pelatih Olahraga Unggulan dan Potensial Bersertifikat}}{\text{Jumlah Seluruh Pelatih Olahraga Unggulan dan Potensial yang ada di Kab. Wakatobi}} \times 100\%$
2.13.1.5	Persentase Organisasi Kepramukaan yang di Bina	%	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Kepramukaan yang di bina}}{\text{Jumlah Organisasi Kepramukaan yang ada di Kabupaten Wakatobi}} \times 100\%$
<b>2.14</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</b>		
2.14.1	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		
2.14.1.1	persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
<b>2.15</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Persandian</b>		
2.15.1	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		
2.15.1.1	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah daerah kabupaten	%	Jmh nilai per area keamanan informasi ----- x 100% jumlah area penilaian
<b>2.16</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan</b>		
2.16.1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
2.16.1.1	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	Jumlah budaya Daerah yang di kembangkan dan di selenggarakan pada tahun t ----- x 100% Total budaya daerah di kabupaten wakatobi
2.16.1.2	Pelestarian Kesenian Tradisional	Jumlah Seni	Jumlah Kesenian Tradisional Daerah kabupaten wakatobi
2.16.1.3	Cakupan Pembinaan Sejarah termasuk penulisan Sejarah dan Pemanfaatan tempat- tempat Sejarah	Orang	Jumlah Peserta Pembinaan Sejarah termasuk penulisan Sejarah dan Pemanfaatan tempat-tempat Sejarah di Kabupaten Wakatobi
2.16.1.4	Pelestarian Cagar Budaya dan penetapan Cagar budaya	Jumlah	Jumlah situs cagar budaya yang dikembangkan dan ditetapkan pada tahun t
2.16.1.5	Cakupan Pengelolaan Permuseuman dan pelatihan kurator	%	Jumlah Benda koleksi yang ada di museum pada tahun t ----- x 100% Total benda berSejarah yang ada di daerah kabupaten wakatobi
<b>2.17</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan</b>		
2.17.1	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		
2.17.1.1	Peningkatan Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Orang	Jumlah Pengunjung Perpustakaan
2.17.1.2	Koleksi Buku Nasional dan Naskah Kuno Yang di lestarikan	Jumlah	Jumlah Koleksi Naskah Kuno
<b>2.18</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan</b>		
2.18.1	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		
2.18.1.1	tingkat ketersediaan arsip	%	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip ----- x 100% Jumlah seluruh arsip aktif
2.18.1.2	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	%	Jumlah SDM Kearsipan ----- x 100% Jumlah SKPD se-Kabupaten Wakatobi

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
<b>3</b>	<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>		
<b>3.1</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan</b>		
3.1.1	Dinas Kelautan dan Perikanan		
3.1.1.1	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	Jumlah produksi perikanan tangkap
3.1.1.2	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	Jumlah produksi perikanan budidaya
3.1.1.3	Persentase usaha perikanan yang memiliki sertifikat CPIB/CBIB	%	Jumlah usaha perikanan yang memiliki sertifikat ----- X 100% dibagi dengan jumlah usaha perikanan yang ada dikali
3.1.1.4	Cakupan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan yang berkualitas	%	Jumlah kelompok olahan yang berkualitas ----- X 100% dibagi dengan jumlah kelompok binaan dikali
<b>3.2</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata</b>		
3.2.1	Dinas Pariwisata		
3.2.1.1	Jumlah Total Nilai Investasi Usaha di Sektor Pariwisata	Rp	Jumlah kondisi awal (tahun sebelumnya) + target peningkatan
3.2.1.2	Tingkat Okupansi/Hunian Akomodasi	%	Jumlah wisatawan per tahun x rata-rata lama tinggal ----- X 100% Jumlah kamar tersedia selama 1 tahun
3.2.1.3	Rata-rata Lama Tinggal	hari	Jumlah wisatawan per tahun ----- X 100 % jumlah kamar tersedia selama setahun
3.2.1.4	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jumlah	Jumlah kondisi awal (tahun sebelumnya) + target peningkatan
3.2.1.5	Jumlah Wisatawan Nusantara	Jumlah	Jumlah kondisi awal (tahun sebelumnya) + target peningkatan
3.2.1.6	Jumlah Total Omset Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Rp	Jumlah kondisi awal (tahun sebelumnya) + target peningkatan
3.2.1.7	Persentase Serapan SDM disektor Pariwisata terhadap serapan tenaga kerja di semua sektor	%	Jumlah tenaga kerja yang bekerja disektor ekonomi kreatif ----- X 100 % Jumlah angkatan kerja yang bekerja disemua sektor
3.2.1.8	Persentase Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Memiliki Sertifikat Kopetensi	%	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi ----- X 100 % Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
<b>3.3.</b>	<b>Urusan Pertanian</b>		
3.2.2	Dinas Pertanian		
3.2.2.1	Jumlah Produksi pertanian (ton)	Ton	Jumlah peningkatan produksi Tanaman Pangan + Hortikultura+ Perkebunan + Peternakan
3.2.2.2	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	%	$\frac{\text{Jumlah prasarana pertanian yang tersedia}}{\text{Total Kebutuhan Prasarana Pertanian}} \times 100 \%$
3.2.2.3	Persentase Kasus penyakit hewan yang di tangani	%	$\frac{\text{Jumlah Kasus penyakit hewan yang di tangani}}{\text{jumlah kasus penyakit hewan}} \times 100 \%$
3.2.2.4	Persentase Penanggulangan Bencana Pertanian	%	$\frac{\text{Jumlah Kasus serangan hama dan penyakit tanaman yang di tangani}}{100\% \text{ Jumlah Kasus serangan hama dan penyakit tanaman}} \times 100 \%$
3.2.2.5	Rekomendasi Teknis	%	$\frac{\text{jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan}}{100\% \text{ jumlah seluruh permohonan rekomendasi}} \times 100 \%$
3.2.2.6	Penguatan Kapasitas penyuluh dan petani	%	$\frac{\text{jumlah penyuluh dan petani yang terampil}}{100\% \text{ jumlah penyuluh dan petani}} \times 100 \%$
<b>3.3</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>		
3.3.1	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan		
3.3.1.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha}} \times 100\%$
3.3.1.2	Jumlah Sarana/prasarana perdagangan baru yang dibangun	Unit	$\frac{\text{Jumlah Pasar Prasarana Perdagangan yang dibangun tahun n}}{\text{Jumlah Pasar Prasarana Perdagangan yang dibangun tahun n-1}} \times 100\%$
3.3.1.3	Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal	%	$\frac{\text{Jumlah Pedagang/Usaha Informal tahun n}}{\text{Jumlah Pedagang/Usaha Informal tahun n-1}} \times 100 \%$
3.3.1.4	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PAD	Rp.	Jumlah Target PAD tahun n
3.3.1.5	Tersedianya Dokumen pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dokumen	Jumlah Dokumen pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting tahun n

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
3.3.1.6	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	Realisasi ----- X 100% RDKK*
3.3.1.7	Volume Perdagangan Antar Pulau	%	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terdistribusi antar pulau
3.3.1.8	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	Jumlah UTTP bertanda tera yang belaku pada tahun berjalan (n) ----- X 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib di tera dan teraulang di wilayah kab / kota
3.3.1.9	Cakupan Pedagang/ Pelaku Usaha Wajib Tera yang mendapatkan pembinaan kemetrolagian	%	Jumlah Pedagang/ Pelaku Usaha Wajib Tera yang mendapatkan pembinaan Kemetrolagian Tahun n ----- X 100% Jumlah pedagang/ pelaku usaha Wajib Tera se- Kab. Wakatobi
3.3.1.10	Tersedianya sistem informasi produk pasar rakyat	Ada/Tidak	Jumlah sistem informasi produk pasar rakyat
<b>3.4</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian</b>		
3.4.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3.4.1.1	Dokumen RPIK yang ditetapkan menjadi PERDA	Dokumen	Ada / Tidak
3.4.1.2	Persentase Peningkatan Jumlah IKM	%	Jumlah indrustri kecil dan menengah tahun n – Jumlah indrustri kecil dan menengah tahun n – 1 ----- X 100% Jumlah indrustri kecil dan menengah tahun n-1
3.4.1.3	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang memiliki izin	%	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan ----- X 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab / Kota
3.4.1.4	Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	%	1) Keterkinian informasi industri :  - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
4.1	Unsur Sekretariat Daerah		
4.1.1	Sekretariat Daerah		
4.1.1.1	persentase OPD yang menerapkan SOP sesuai Tata Laksana Pelaksanaan Pemerintahan	%	jumlah OPD yang menerapkan SOP sesuai Tatalaksana ----- X 100% Jumlah OPD
4.1.1.2	Persentase PD yang menyampaikan SAKIP tepat waktu	%	tepat waktu
4.1.1.3	Indeks kepuasan pelayanan kedinasan pimpinan	Predikat	Survey Kepuasan
4.1.1.4	Persentase kegiatan Pemerintah yang dipublikasi	%	jumlah kegiatan pemda yang dpublikasi ----- X 100% jumlah kegiatan publikasi pemda yang di usulkan
4.1.1.5	Persentase MoU yang ditindaklanjuti	%	Jumlah MoU yang ada ----- x 100% Jumlah MoU yang ditindaklanjuti
4.1.1.6	Persentase PD yang menyampaikan LPPD tepat waktu	%	tepat waktu
4.1.1.7	Persentase Produk hukum yang ditetapkan	%	Jumlah Produk Hukum (Perda dan Perbup) yang ditetapkan ----- x 100% Jumlah Produk Hukum yang diusulkan (Perda dan Perbup) Pemerintah Daerah
4.1.1.8	Persentase Lembaga Keagamaan yang dibina	%	Jumlah Lembaga Keagamaan yang dibina ----- X 100% Jumlah Lembaga Keagamaan
4.1.1.9	Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode Kompetitif	%	Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode Kompetitif ----- x 100% Jumlah Pengadaan yang dilakukan tanpa metode Kompetitif
4.1.1.10	Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui pengadaan Langsung	%	Jumlah Nilai Belanja langsung yang melalui pengadaan ----- x 100 Total Belanja Langsung
4.1.1.11	Persentase BUMD/Perumda yang ditetapkan dengan Perda	%	Jumlah BUMD/Perumda yang ditetapkan dengan Perda ----- x 100 umlah BUMD/Perumda yang ada *100%
4.1.1.12	Persentase OPD yang membuat laporan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu	%	jumlah OPD yang menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu ----- x 100 Jumlah OPD
4.1.1.13	persentase jumlah total proyek kontruksi yang dibawah ketahun	%	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan daam 3 kuartal yang di tandatangani pada kuartal

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
	berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama		pertama tahun n ----- X 100 % Jumlah kontrak keseluruhan tahun n
4.1.1.14	persentase PD yang menyampaikan laporan SPM tepat waktu	%	tepat waktu
4.1.1.15	Persentase Menyampaikan Reformasi birokrasi tepat waktu	%	tepat waktu
<b>4.2</b>	<b>Unsur Sekretariat DPRD</b>		
4.2.1	Sekretariat DPRD		
4.2.1.1	Penyusunan dan Pembahasan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	%	Jumlah Perda & Peraturan DPRD ----- x 100% Jumlah Raperda & Raper DPRD
<b>5</b>	<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>		
5.1	Unsur Perencanaan		
5.1.1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5.1.1.1	Persentase ketersediaan Dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perda	%	Jumlah dokumen perencanaan tahun berjalan ----- x 100 % Jumlah dokumen yang ditetapkan
5.1.1.2	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	%	Jumlah dokumen yang direncanakan tahun berjalan ----- x 100 % Jumlah dokumen yang dihasilkan
5.1.1.3	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPd	%	Jumlah Program RKPd tahun berkenaan ----- x 100 % Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan
5.1.1.4	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	Kesesuaian Program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur Ruang ----- x 100 % Dokumen RTRW
5.1.1.5	Sinkronisasi/Kesesuaian Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan kewilayahan kedalam RKPd bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	Jumlah Kesesuaian Program RKPd Bidang Infrastruktur dan kewilayahan tahun berkenaan ----- x 100 % Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan Bidang infrastruktur dan Kewilayahan
5.1.1.6	Sinkronisasi/Kesesuaian Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kedalam RKPd bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	Jumlah Kesesuaian Program RKPd Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tahun berkenaan ----- x 100 % Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
5.1.1.7	Sinkronisasi/ Kesesuaian Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam kedalam RKPD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	Jumlah Kesesuaian Program RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam tahun berkenaan ----- x 100 % Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
<b>5.2</b>	<b>Unsur Keuangan</b>		
5.2.1	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah		
5.2.1.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Predikat	Opini BPK
5.2.1.2	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD (Hari)	Hari	Tanggal penyampaian RAPBD-Tanggal penandatanganan Nota kesepakatan KUA / PPAS
5.2.1.3	Persentase realisasi Belanja terhadap anggaran belanja yang ditetapkan (%)	%	Realisasi Belanja ----- x 100% Anggaran Belanja
5.2.1.4	Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	%	Jumlah Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP ----- X 100% Jumlah Seluruh Laporan Keuangan OPD dilingkungan Pemerintah Kab. Wakatobi
5.2.1.5	Presentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara tepat waktu (%)	%	Jumlah SP2D yang terbit tepat waktu dibandingkan jumlah keseluruhan SP2D yang terbit
5.2.1.6	Presentase tanah milik pemerintah Kabupaten Wakatobi yang bersertifikat (%)	%	Jumlah tanah yang telah bersertifikat ----- x 100 % jumlah tanah yang dimiliki Pemerintah daerah
5.2.2	<b>Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah</b>		
5.2.2.1	Meningkatnya jumlah Pendapatan Pajak	Rp	Jumlah Realisasi Pajak
5.2.2.2	Meningkatnya Jumlah Retribusi Daerah	Rp	Jumlah Reralisasi Retribusi
<b>5.3</b>	<b>Unsur Kepegawaian</b>		
5.3.1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		
5.3.1.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas ----- x 100% Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah
5.3.1.2	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	Jumlah pegawai PNS fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan) ----- x 100% Seluruh jumlah pegawai pemerintah ( PNS

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
			tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
5.3.1.3	Persentase keakuratan sistem informasi manajemen kepegawaian	%	Jumlah pemuktahiran data ASN ----- x 100% Jumlah seluruh data ASN
<b>5.4</b>	<b>Unsur Pendidikan dan Pelatihan</b>		
5.4.1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		
5.4.1.1	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100% Seluruh jumlah pegawai Fungsional ( PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
5.4.1.2	Persentase PNS yang mengikuti diklat yang seharusnya diikuti	%	Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat yang seharusnya diikuti ----- x 100% Jumlah jabatan struktural
<b>5.5</b>	<b>Urusan Penelitian dan Pengembangan</b>		
5.5.1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5.5.1.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	Jumlah Kelitbangan dalam RKPD ----- x 100% Jumlah Kelitbangan dalam RPJMD
5.5.1.2	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	%	Jumlah Kebijakan inovasi yang diterapkan ----- x 100% Jumlah inovasi yang diusulkan
<b>6</b>	<b>Unsur Pengawas</b>		
<b>6.1</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>		
6.1.1	Inspektorat		
6.1.1.1	Presentase SKPD dengan Level maturitas SPIP Level 3	%	Jumlah SKPD dengan Level maturitas SPIP Level 3 ----- x 100% Jumlah SKPD se-Kabupaten Wakatobi
6.1.1.2	Persentase SKPD dengan Indeks Reformasi Birokrasi Level 3	%	Jumlah SKPD dengan Indeks Reformasi Birokrasi Level 3 ----- x 100% Jumlah SKPD se-Kabupaten Wakatobi
6.1.1.3	Persentase OPD Pemangku Aksi Pencegahan Korupsi yang mencapai Nilai 75%	%	Jumlah OPD Pemangku Aksi KORSUPGAH dengan Nilai Minimal 75 % ----- x 100% Jumlah SKPD se-Kabupaten Wakatobi
<b>7</b>	<b>Unsur Kewilayahan</b>		
7.1	Kecamatan		
7.1.1	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	Jumlah urusan yang dilaksanakan ----- x 100% Jumlah yang seharusnya dilaksanakan
7.1.2	Cakupan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	Jumlah desa/kelurahan yang diberdayakan ----- x 100% Jumlah desa/kelurahan keseluruhan

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
7.1.3	Cakupan penanganan keamanan dan ketertiban umum	%	Jumlah kasus keamanan dan ketertiban umum yang ditangani ----- x 100% Jumlah kasus keseluruhan
7.1.4	Cakupan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	Jumlah desa/kelurahan yang dibina ----- x 100% Jumlah desa/kelurahan keseluruhan
7.1.5	Persentase desa yang tertib administrasi	%	Jumlah desa yang tertib administrasi ----- x 100% Jumlah desa keseluruhan
8	<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>		
8.1	<b>Kesatuan Bangsa Dan Politik</b>		
8.1.1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
8.1.1.1	Presentase pembinaan wawasan kebangsaan di sekolah-sekolah	%	Jumlah sekolah (sma/man) yang di bina ----- x 100% jumlah sekolah (sma/man)
8.1.1.2	Presentase pembinaan wawasan kebangsaan pada ormas	%	Jumlah orms yang di bina ----- x 100% jumlah ormas
8.1.1.3	Persentase Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang dibina	%	jumlah parpol yang di bina ----- x 100% jumlah parpol
8.1.1.4	Presentase lembaga pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik	%	Jumlah sekolah yang di bina (sma/ma) ----- x 100% jumlah lembaga pendidikan (sma/ma)
8.1.1.5	Presentase ormas dsn LSM yang memiliki surat keterangan terdaftar (SKT)	%	Jumlah ormas dan lsm yang memilki SKT ----- x 100% jumlah ormas dan lsm
8.1.1.6	Presentase desa/kelurahan yang di bina dan di kembangkan	%	Jumlah desa / Kelurahan yang di bina dan di kembangkan ----- x 100% jumlah desa / kelurahan
8.1.1.7	Presentase penanganan potensi konflik sosial yang tertangani	%	Jumlah potensi konflik sosial yang teratasi ----- x 100% jumlah potensi konflik sosial
9.	<b>Penunjang</b>		
xxx	Cakupan Pemenuhan Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan	%	Rata-rata capaian realisasi kegiatan (%)

PARAF KORDINASI		
NO	UNT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Astuta Perencanaan & Pemb.	
3	Kc. Bappeda	
4	Kebay. Hukum	
5		

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA